



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURAENI KOMARUDIN
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 77567

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **480.800.002**

1. Tanah Seluas 991 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 34.685.000
2. Tanah Seluas 1151 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 5.755.000
3. Tanah Seluas 3913 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 1
4. Tanah Seluas 1366 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, WARISAN Rp. 1
5. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 115.360.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/207 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **184.500.001**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOTOR, - - Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	41.701.236
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	708.501.239
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	708.501.239

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.